

Tinjauan hukum sengketa pajak air permukaan pada putusan Mahkamah Agung nomor 319/B/PK/Pjk/2018 ditinjau dari ketentuan pajak daerah dan kewenangan pemerintah daerah dalam memungut pajak daerah =  
Legal review of surface water tax disputes on supreme court decision number 319/B/PK/Pjk/2018 in terms of local tax provisions and regional government authority in collecting taxes

Dimas Agung Pamungkas, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20494318&lokasi=lokal>

---

Abstrak

PT Freeport Indonesia telah melakukan aktifitas pertambangan pada sungai yang telah ditetapkan sebagai objek pajak daerah. Oleh karena itu Pemda Papua menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Air Permukaan No. 973/1783 kepada PT Freeport dan mewajibkannya membayar Pajak Air Permukaan sebesar Rp. 33.384.960.000. Namun PT Freeport merasa tidak mempunyai kewajiban untuk membayar Pajak tersebut dengan alasan dasar hukum dalam SKPD tidak sesuai dengan pengaturan dalam kontrak karya. Setelah melalui proses pengadilan sampai pada Mahkamah Agung, PT Freeport akhirnya dibebaskan dari segala kewajiban pajak air permukaan. Skripsi ini membahas dua pokok permasalahan. Pertama, bagaimana pengaturan dan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua dalam memungut Pajak Air Permukaan bagi perusahaan tambang di Provinsi Papua? Kedua, apakah Putusan Mahkamah Agung Nomor 319/B/PK/Pjk/2018 yang mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali PT Freeport Indonesia telah tepat? Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis-normatif. Tujuan dari penelitian ini pertama, untuk mengetahui dan mengidentifikasi persoalan hukum yang terjadi pada sengketa ini. Kedua, mengetahui bagaimana pengaturan pajak daerah dan kewenangan pemerintah daerah dalam memungut pajak air permukaan. Ketiga untuk mengetahui dan mengidentifikasi persoalan hukum yang ada pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 319/B/PK/Pjk/2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Papua berwenang memungut Pajak Air Permukaan kepada PT Freeport berdasarkan kewenangan yang diperolehnya secara Atribusi dari Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kemudian pertimbangan-pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 319/B/PK/Pjk/2018 tidak mempunyai landasan yuridis yang kuat dan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

<hr>

PT. Freeport Indonesia has carried out mining activities on rivers that have been designated as objects of regional taxes. Therefore, the Papua Regional Government issued Regional Tax Assessment Letter (RTAL) on Surface Water Tax Number 973/1783 to PT. Freeport and oblige them to pay Surface Water Tax as much as Rp 33.384.960.000. But PT. Freeport felt that it has no obligation to pay the Tax on the grounds that legal basis in the RTAL is not accordance with the regulations in the Contract of Work. After going through trial proceedings to the Supreme Court, PT. Freeport is exempt from any obligation for Surface Water Tax. This thesis discusses two main problems. First, how are the regulations and authorities of the regional government in collecting local taxes for mining companies in the Papua Province? Second, Is Supreme Court decision Number 319/B/PK/Pjk/2018 which granted PT. Freeports Reconsideration right. This thesis was conducted in a juridical-normative method. The purposes of this thesis are, first, to know and identify

legal issues that occur in this dispute. Second, knowing how the regional tax regulations and government authorities on Surface Water Tax collection. Third, to know and identify legal issues that occurs on Supreme Court decision Number 319/B/PK/Pjk/2018. The result of this thesis shows that Papua Government has the authority to collect the Surface Water Tax on PT. Freeport based on Attribution from Regional Tax and Retribution Act. Then the deliberation of the judges on Supreme Court decision Number 319/B/PK/Pjk/2018 doesnt have a strong juridical basis and is not based on applicable laws and regulations.